

Faktor Sosial dan Ekonomi sebagai Penyebab Peningkatan Respon Anti-Imigran di Norwegia Tahun 2008-2011

Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar – 070912019

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Norway has one of the best destinations for immigrants from Africa and the Middle East. It turns out that the arrival of the immigrants raises the disappointment of Norwegians against the ruling government. The disappointment is shown by an attitude of discrimination and anti-immigrant. The researcher intends to find out how the rising anti-immigrant response in Norway may occur while on the other side, the Norwegian Government seeks to open to the presence of immigrants. The problems are analyzed using socio-economic factors as the main cause of the rise of anti-immigrant response. In social factor, there are some concerns toward the threatened national identity as well as the persistence of xenophobia against Moslem immigrants. While in the economic factor, there are some concerns about the economic security of employment in Norwegian society. Based on the analysis of these data, it could be concluded that the presence of anti-immigrant response is caused by fear that the national identity is threatened and as a step in maintaining employment for the Norwegian.

Keywords: Immigrant, Norwegia, Xenophobia, Social Factor, Cultural Factor.

Norwegia merupakan salah satu negara tujuan terbaik bagi para imigran dari Afrika dan Timur Tengah. Ternyata banyaknya para imigran yang datang ke wilayah tersebut di sisi lain meningkatkan jumlah kekecewaan masyarakat Norwegia dalam bentuk sikap diskriminasi serta protes anti-imigran. Peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana meningkatnya respon anti-imigran di Norwegia dapat terjadi sedangkan di sisi lain Pemerintah Norwegia berupaya terbuka terhadap kehadiran para imigran. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan faktor sosial ekonomi sebagai penyebab utama munculnya respon anti-imigran. Dalam faktor sosial, terdapat kekhawatiran terancamnya identitas nasional serta masih adanya yang berpandangan xenophobia terhadap imigran muslim. Sedangkan dalam faktor ekonomi, terdapat kekhawatiran terancamnya economic security yang berupa lapangan kerja masyarakat Norwegia. Berdasarkan analisis data tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa adanya respon anti-imigran disebabkan oleh adanya kekhawatiran terancamnya identitas nasional serta sebagai salah satu langkah dalam mempertahankan lapangan kerja bagi masyarakat asli Norwegia.

Kata-Kata Kunci: Imigran, Norwegia, Xenophobia, Faktor Sosial, Faktor Kultural.

Norwegia sebagai Negara Tujuan Buruh Imigran

Sejarah imigrasi di kawasan Eropa mencatat bahwa banyaknya para imigran yang datang ialah disebabkan oleh faktor ekonomi atau mencari kehidupan yang lebih baik akibat banyaknya penindasan yang dilakukan di saat Perang Dunia (PD) II. Negara-negara di Eropa mulai meninggalkan paradigma restriksionis dan berusaha memperluas akses untuk migrasi tenaga kerja. Norwegia sebagai negara yang tergabung dalam kawasan Eropa Utara juga terbuka dalam memberikan akses terhadap para imigran. Sejak akhir tahun 1960 atau tepatnya setelah penemuan ladang minyak, Norwegia mengalami imigrasi besar-besaran dari Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia, Afrika dan Amerika Selatan (www.norwegia.or.id). Salah satu negara di kawasan Eropa yang memiliki keunggulan lebih ialah negara Norwegia, dimana pada tahun 2011 survei UNDP (*United Nations Development Programme*) menunjukkan bahwa Norwegia merupakan negara terbaik di dunia dengan tiga indikator penilaian yaitu tingkat pendidikan, pendapatan per-kapita, dan kesehatan masyarakat. Dimana biaya pendidikan disana gratis pada semua jenjang, kesenjangan ekonomi pada negara tersebut tidak terlalu tinggi karena upah minimum di Norwegia cukup tinggi, dan di bidang kesehatan Norwegia menggratiskan biaya perawatan kesehatan hingga biaya persalinan juga diberi bantuan oleh pemerintah (www.undp.org). Terlebih lagi Norwegia memiliki kelebihan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup tinggi dan merupakan negara pengekspor terbesar ketujuh minyak dunia serta pengekspor terbesar kedua gas alam (www.state.gov). Berdasarkan hasil evaluasi *Migrant Integration Policy Index* (MIPEX), Norwegia merupakan negara ke delapan dari 28 negara yang memberikan penerimaan dan akses pasar tenaga kerja yang cukup tinggi bagi para imigran (www.regjeringen.no).

Norwegia sangat mempertahankan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan bagi para imigran yang berada dalam negaranya, oleh karena itu Norwegia tergolong sebagai negara dengan perlindungan kemanusiaan yang cukup baik dalam mengatasi masalah pengungsi. Pada akhir tahun 1960, kombinasi ekonomi yang *booming* dan kekurangan penduduk dalam negara Norwegia mengakibatkan peranan imigran menjadi suatu hal yang sangat penting. Meskipun menolak bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa, Norwegia bergabung dengan *European Economic Area* (EEA) dan *Schengen Agreement* yang memungkinkan pergerakan orang dan modal menjadi semakin bebas antar negara anggota. Dalam upayanya terbuka terhadap kehadiran imigran juga terlihat pada beberapa kebijakan migrasi, yaitu pada tahun 1990 Norwegia mengeluarkan *the Aliens Decree* yang sedikit meliberalisasi ketentuan perijinan suaka dan ijin kerja. Lalu pada tahun 1997, terdapat Undang-Undang yang fokus utamanya ialah pada program pelatihan kerja dan bahasa bagi integrasi imigran di Norwegia. Pada tahun 2003,

Introduction Act menuntut partisipasi aktif imigran yang berusia 18-55 tahun dalam program integrasi di bawah Pemerintah Kota dalam Negara Norwegia (www.migrationinformation.org). Pada tiga dekade sebelumnya migrasi didominasi oleh pencari suaka, pengungsi dan reuni keluarga. Namun semenjak tahun 2004, skema imigrasi mulai banyak disebabkan oleh migrasi tenaga kerja. Buruh imigran masih dibutuhkan oleh Pemerintah Norwegia untuk memenuhi kekurangan angkatan kerja baik di bidang pekerjaan yang berketerampilan rendah maupun pekerjaan yang sebelumnya diisi oleh angkatan kerja lanjut usia (www.ssb.no). Pada tahun 2008, Pemerintah Norwegia memberikan kemudahan bagi para imigran yang berasal dari negara-negara EEA untuk dapat langsung bekerja ketika menunggu pengurusan izin tinggal (www.regjeringen.no).

Awalnya Norwegia diuntungkan dengan hadirnya buruh imigran, namun pada tahun-tahun terakhir data statistik Norwegia menunjukkan tingkat pengangguran di Norwegia bertambah yaitu pada tahun 2008 sebanyak 2,6% lalu tahun 2009 sebanyak 3,2% kemudian di tahun 2010 meningkat kembali sebanyak 3,6%, barulah pada tahun 2011 mulai turun menjadi 3,4% (www.tradingeconomics.com). Pengaruh banyaknya imigran yang berada di Norwegia dapat memberikan ancaman yang cukup serius bagi penduduknya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Randall Hansen bahwa meningkatnya jumlah imigrasi akan lebih menciptakan persoalan ketidakpercayaan interpersonal dan kekhawatiran akan penyebaran kesejahteraan yang lebih sedikit (Hansen, 2007: 337). Dari fakta yang ada di atas maka menjadi menarik untuk diteliti dalam menjelaskan bagaimana pengaruh upaya Pemerintah Norwegia yang terbuka dengan kehadiran para imigran terhadap peningkatan respon anti-imigran dari masyarakat Norwegia.

Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Peningkatan Respon Anti-Imigran di Norwegia

Norwegia membuka kesempatan bagi para imigran untuk datang ke negaranya dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri dan mampu memberikan efek positif dalam keberlangsungan kondisi sosial maupun ekonomi. Terdapat keyakinan bahwa imigran dari berbagai belahan dunia ataupun dari sesama negara kawasan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan orang dari negara tujuan itu sendiri. Menurut data statistik Norwegia pemerintah berupaya untuk meningkatkan populasi Norwegia sebanyak enam juta jiwa dalam satu dekade (www.theforeigner.no). Secara teoritis volume migrasi (internal maupun internasional) paling sedikit ditentukan oleh tiga faktor yaitu politik, ekonomi dan aksesibilitas. Tekanan ekonomi di daerah asal menyebabkan migran mencari solusi

alternatif untuk tetap *survive* (www.migrationinformation.org). Menurut sejarahnya, imigran yang datang ke Norwegia ialah berasal dari negara-negara tetangga namun berjalannya waktu hingga saat ini di Norwegia terdapat para imigran yang berasal dari lebih 200 negara di dunia. Dimulai pada akhir tahun 1960 saat Norwegia mengalami *booming economic* dan kekurangan penduduk, peranan buruh imigran menjadi suatu hal yang sangat penting. Berdasarkan laporan resmi (*Norges Offentlige Utredninger*-NOU) yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pemerintah Norwegia memiliki kebutuhan akan buruh imigran baik dari negara-negara EEA maupun di luar negara Eropa untuk menutupi kebutuhan pasar tenaga kerja di masa yang akan datang. Permintaan tenaga kerja buruh imigran terus meningkat khususnya di bidang teknik dan teknologi informasi, selain itu juga untuk memenuhi sektor lain seperti sektor kesehatan atau perawatan lansia (www.regjeringen.no).

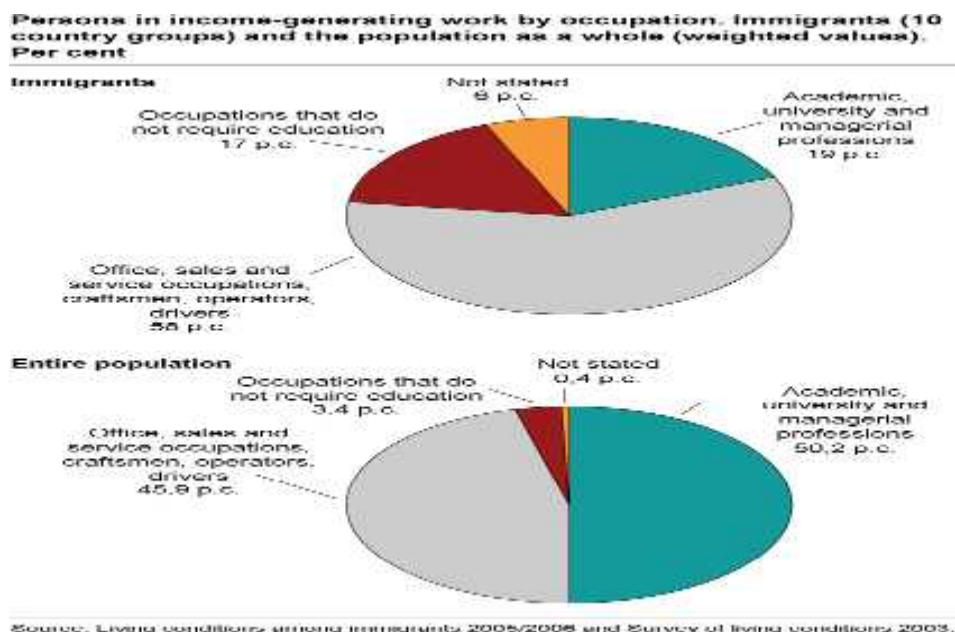
Dalam website resmi Menteri Tenaga Kerja Norwegia, terdapat slogan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama, hak dan kewajiban yang sama dalam bermasyarakat, serta berhak memanfaatkan sumber daya mereka terlepas dari latar belakang ekonomi maupun sosial. Hal tersebut coba diwujudkan oleh Pemerintah Norwegia melalui *action plan* tahun 2009 yang memprioritaskan pada tiga tujuan yaitu: 1) Peluang bagi semua untuk dapat berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja; 2) Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bagi anak-anak dan pemuda; 3) Memperbaiki kondisi kehidupan yang telah dirugikan (www.regjeringen.no).

Saat ini, hampir 50 tahun Norwegia terbuka menjadi negara dengan populasi imigran yang besar dan terus menghadapi tantangan kritis untuk melakukan integrasi antara buruh imigran dan masyarakat Norwegia. Gjendem Torgeir Mortensen seseorang berkebangsaan Norwegia melakukan pengamatan mengenai integrasi buruh imigran dalam pasar tenaga kerja, ia mengemukakan bahwa keturunan imigran memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan dibandingkan dengan orang-orang mayoritas pribumi. Keturunan imigran mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar tenaga kerja, namun apabila telah berhasil maka penerimaannya akan sama dengan penduduk asli Norwegia pada umumnya (www.duo.uio.no).

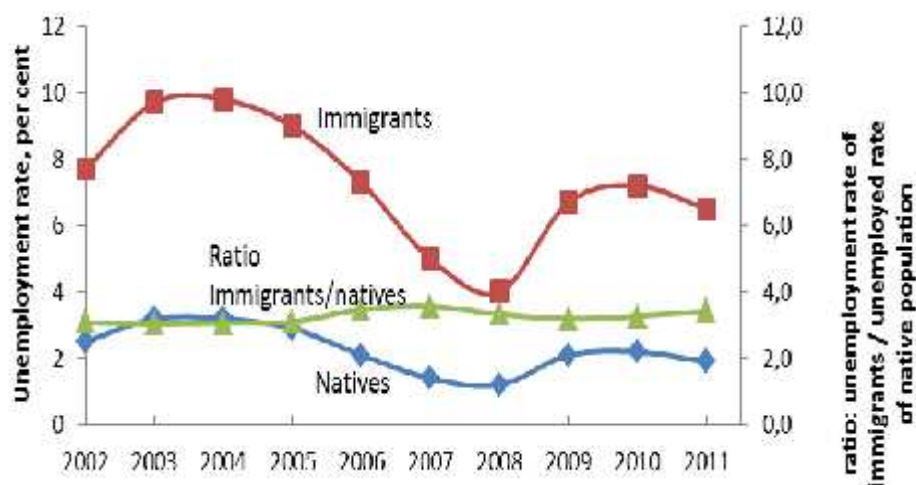
Grafik 1 menunjukkan bahwa jumlah buruh imigran yang bekerja di bidang yang tidak membutuhkan kemampuan pendidikan ialah sebanyak 17%, tidak jauh beda dengan lapangan pekerjaan yang menuntut latar belakang akademis dan tenaga profesional yaitu sebanyak 19%. Sedangkan lapangan pekerjaan yang hampir bersinggungan dengan keseluruhan penduduk Norwegia ialah di bidang

jasa, tenaga kerja kantor, operator, pengrajin, supir, dan jasa penjualan (www.ssb.no). Dari data yang ada pada Kementerian Tenaga Kerja Norwegia ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan buruh imigran tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengangguran masyarakat atau penduduk asli Norwegia. Tingkat pengangguran meningkat tajam selama krisis ekonomi dimulai pada Agustus 2008 dari 2,3% menjadi 8,3% pada Agustus 2009, dan pada Agustus 2011 mulai menurun menjadi 6,3% (www.regjeringen.no). Banyaknya buruh imigran yang menganggur, oleh Pemerintah Norwegia dianggap perlu untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja sebelum mereka bersaing di pasar tenaga kerja Norwegia melalui program ALMP (*Active Labour Market Policy*) yang di dalamnya terdapat pelatihan kerja serta pelatihan bahasa (www.regjeringen.no). Berdasarkan latar belakang negara asal buruh imigran, Grafik 3 menunjukkan bahwa yang tergolong dalam angka pengangguran tertinggi ialah imigran dari negara Afrika. Lalu imigran dari negara Asia, dan kemudian disusul oleh imigran dari negara-negara di Eropa (www.ssb.no). Jika melihat jangka waktu tinggal untuk bekerja di Norwegia berdasarkan negara asal maka diperoleh data bahwa imigran yang berasal dari negara-negara Eropa akan tinggal antara 4-6 tahun, sedangkan dari negara-negara Asia dan Afrika lebih banyak yang tinggal selama 7 tahun atau bahkan lebih (www.regjeringen.no). Dapat dikatakan bahwa banyaknya jumlah buruh imigran yang kemudian menganggur dikarenakan jangka waktu tinggal yang lumayan lama serta tidak diimbangi dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi.

Grafik 1. Tingkat Lapangan Pekerjaan Buruh Imigran



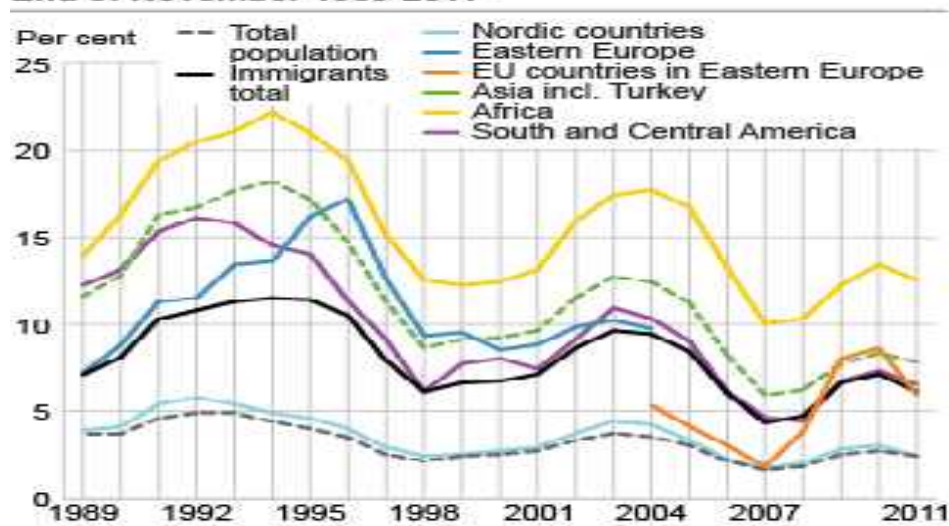
Grafik 2. Tingkat Pengangguran dalam Prosentase Angkatan Kerja antara Imigran dan Masyarakat Norwegia tahun 2002-2011



Sumber: www.regjeringen.no

Grafik 3. Tingkat Pengangguran Buruh Imigran Berdasarkan Negara Asal Tahun 1989-2011

Registered unemployed aged 16-74¹, by country background. As a percentage of the labour force. End of November 1989-2011²



¹ Age group 16-74 years prior to 2008.

² Break in the time-series in 1989 because of changes in the definition of unemployed.

Sumber: www.ssb.no

Pemerintah Norwegia dalam mengeluarkan kebijakan imigrasi selalu mengalami perubahan yang lebih baik dalam menghargai keberadaan para imigran. Pada tahun 1970, pemerintah Norwegia menekankan aspek asimilasi yang mana tugas seorang imigran harus berpartisipasi dan belajar bahasa Norwegia, lalu pada tahun 1980 integrasi Norwegia fokus kepada adaptasi kedua kebudayaan baik budaya negara asal imigran maupun budaya asli Norwegia, kemudian pada tahun 1997 konsep integrasi telah dimaksudkan oleh pemerintah Norwegia untuk mencapai masyarakat multikultural dan menyukseskan terbentuknya negara yang sejahtera (www.migrationinformation.org). Selain itu, Pemerintah Norwegia beranggapan bahwa dengan memberdayakan buruh imigran agar meningkatkan kualitas kinerja mereka, maka nantinya buruh imigran di pasar tenaga kerja dapat lebih mandiri dan pada masa yang akan datang tidak selalu bergantung kepada sistem kesejahteraan Norwegia. Sehingga Norwegia berusaha menjadi negara yang menciptakan adanya kontribusi pada partisipasi tingkat tinggi kehidupan kerja, misalnya dengan menekankan pendidikan umum gratis dan mengeluarkan beberapa kebijakan pasar tenaga kerja aktif (www.emnbelgium.be).

Storhaug dan Karlsen dari badan statistik Norwegia mengatakan bahwa bagaimanapun banyaknya imigran asing di Norwegia hanya akan berdampak surplus yang kecil bagi tingkat kemajuan perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan lebih banyak beban atau biaya menanggung imigran asing daripada memperoleh keuntungan dari hadirnya para imigran (www.theforeigner.no). Bahkan menurut Kantor Statistik Pusat Norwegia (SSB), penduduk pribumi Norwegia justru akan menjadi kelompok yang minoritas di dalam negara mereka sendiri dalam kurun waktu 30 tahun. Sehingga terlepas dari pendapatan ekspor minyak yang besar bagi Norwegia, sebagian masyarakat Norwegia akan terus mengalami penurunan tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah dalam mengatasi masalah imigran asing.

Faktor Sosial sebagai Penyebab Peningkatan Respon Anti-Imigran di Norwegia

Mayoritas buruh imigran berada di kota Oslo, terdapat 624.000 imigran serta 189.400 imigran yang lahir dari orang tua imigran sebelumnya. Selain di Oslo, buruh imigran juga berada di kota Drammen, Lørenskog, Søndre Nordstrand, dan Stovner og Alna (www.ssb.no). Keberadaan buruh imigran di Norwegia juga banyak yang berasal dari negara-negara Islam. Terbukti pada tahun 2010, sebanyak 11.200 imigran memperoleh status kewarganegaraan Norwegia, yang mana di dalamnya kelompok imigran dari Somalia merupakan kelompok terbesar yaitu sebanyak 1.470 orang. Selain itu adapula imigran yang berasal dari Irak sebanyak

1.330 orang dan 1.050 orang dari Afghanistan diberikan kewarganegaraan Norwegia. Jika ditotal maka mereka mewakili sepertiga dari seluruh jumlah penduduk negara baru Norwegia. Fakta yang ada tersebut menjadikan agama Islam sebagai agama terbesar kedua di Norwegia (www.ssb.no). Bagi masyarakat Eropa secara umum dan masyarakat Norwegia secara khusus, hal tersebut membangkitkan kembali gagasan tentang identitas wilayah mereka karena mayoritas penduduk menganut agama Kristen atau Yahudi. Menurut *European Union Agency for Fundamental Rights* (FRA), 1 dari 3 umat muslim di wilayah Eropa mengalami diskriminasi baik dalam aktifitas ekonomi maupun sosial (Pollak, 2008: 395). Hal tersebut didukung oleh data yang ada pada Laporan Tahunan Migrasi Internasional Norwegia tahun 2011 yang menyebutkan imigran dari negara-negara Muslim cenderung mengalami lebih banyak diskriminasi daripada imigran dari negara lain (www.regjeringen.no).

Elemen kompleks dari migrasi internasional adalah adanya perdebatan mengenai kebijakan migrasi yang menekankan perbedaan pekerja *more-skilled* (pekerja terampil dengan produktivitas tinggi) dan *less-skilled* (pekerja tidak terampil dengan produktivitas rendah). Banyaknya buruh imigran di Norwegia masih tergolong ke dalam imigran *less-skilled* dimana tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang dimiliki masih rendah (www.norface-migration.org). Tingkat penempatan kerja tertinggi masih diisi oleh imigran yang berasal dari negara-negara Barat termasuk negara-negara kawasan Eropa, sementara itu imigran yang berasal dari Afrika dan Asia memiliki tingkat lapangan kerja terendah di Norwegia (www.norface-migration.org). Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa lapangan kerja di Norwegia lebih memprioritaskan buruh imigran yang tidak jauh berbeda latar belakang bahasa maupun budaya yang dimiliki.

Banyaknya buruh imigran yang ada di Norwegia juga menyebabkan penduduk harus menghadapi kenyataan bahwa mereka dituntut untuk selalu memberikan toleransi terhadap kebudayaan asing yang dibawa oleh para imigran serta mereka juga harus menerima kenyataan bahwa kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah Norwegia harus terbagi dengan banyaknya jumlah buruh imigran di negara tersebut. Menurut Chandler dan Tsai (dalam Yvonne Markaki, 2013) pembentukan sikap terhadap kelompok minoritas buruh imigran didasari oleh aspek psikologis, afektif atau ideologis, serta aspek persaingan pasar tenaga kerja. Norwegia tergolong sebagai negara yang aman dan damai serta jauh dari pemberitaan dunia, namun tidak ada yang menduga ternyata sebagian masyarakat Norwegia menyimpan rasa kekecewaan terhadap Pemerintah Norwegia yang liberal dan sangat demokratis kepada para buruh imigran. Pada sebagian masyarakat Norwegia masih berkembang sikap *xenophobia*, yaitu ketakutan yang berbasis pada budaya asing,

sehingga seringkali terjadi permusuhan dalam penerimannya sebagai akibat dari kompetisi pekerjaan, prasangka etnis, ras atau agama (www.sociology.com). Hal tersebut dibuktikan pada tanggal 22 Juli 2011 seseorang berkebangsaan Norwegia, Anders Behring Breivik melakukan serangan bom di pusat kota Oslo dan kamp pelatihan di Pulau Utøya. Breivik secara terang-terangan bahwa ia berpandangan anti Muslim dan anti imigran dengan mengatasnamakan semangat nasionalistik (www.worldnews.nbcnews.com).

Menurut Duckit dan Sibley (dalam Yvonni Markaki, 2013) peningkatan respon anti-imigran didasarkan pada ciri-ciri kepribadian seperti orientasi dominasi sosial dan otoritarianisme sayap kanan, hal tersebut kemudian mencerminkan sikap terhadap hirarki sosial, kesetaraan, dan memperjuangkan nilai-nilai tradisional yang kemudian mengkondisikan persepsi individu dari kelompok imigran sebagai ancaman. Terdapat indikasi bahwa momentum bom Oslo dimanfaatkan oleh partai Konservatif (*Conservative Party / Høyre*) dan partai Kemajuan (*Progress Party / Anti-Immigrant Party / Fremskrittspartiet*) menggabungkan pandangan mereka akan gerakan anti-imigrasi dan anti-Muslim yang dianggap sebagai bentuk perlindungan identitas nasional. Terbukti tingkat dukungan terhadap partai Konservatif semakin mengalami peningkatan. Ditunjukkan pada pemilihan umum yang terjadi pada tanggal 9 September 2013, Partai Konservatif yang berkoalisi dengan Partai Kemajuan yang berbasis anti-imigran mampu mengalahkan Partai Buruh. Partai Konservatif memiliki jumlah pendukung yang semakin bertambah yaitu sebanyak 31,6% pendukung, sedangkan Partai Buruh sebanyak 28% (www.commongroundnews.org).

Fakta yang ada tersebut menunjukkan bahwa penduduk Norwegia mengalami pelemahan nilai kepercayaan pada pemerintah. Masyarakat beranggapan bahwa PM Norwegia Jens Stoltenberg tidak menepati janjinya untuk lebih demokratis, lebih terbuka dan lebih menekankan asas kemanusiaan pada saat setelah serangan bom Oslo. Serta Partai Buruh dianggap kurang serius dalam menangani masalah tenaga kerja (www.nytimes.com). Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan badan statistik Norwegia (SSB) pada tahun 2002-2012 mengenai sikap masyarakat terhadap imigran menunjukkan bahwa 41% responden meyakini bahwa imigran telah menyalahgunakan program kesejahteraan sosial dari pemerintah, lalu 45% suara menyetujui bahwa sebagian besar imigran merupakan sumber ketidakamanan di masyarakat (www.newsinenglish.no). Walaupun fakta yang ada menunjukkan bahwa masalah kekerasan maupun pencurian, minim sekali ditemukan imigran yang melakukan tindak kejahatan serta anggapan bahwa kebudayaan baru yang dibawa oleh imigran asing selalu menghasilkan hal yang buruk tidak terbukti karena sebenarnya para imigran cenderung mau untuk beradaptasi dengan kebudayaan

lokal. Sebagian masyarakat Norwegia juga menganggap bahwa banyaknya imigran hanya akan menambah beban keuangan negara dalam memberikan jaminan-jaminan kesejahteraan bagi para imigran, oleh sebab itu banyak yang memberikan respon anti-imigran kepada Pemerintah Norwegia (www.theforeigner.no). Sehingga terdapat dua pandangan yang kontras dalam kasus ini, protes dari kelompok sayap kanan yang menganggap bahwa terbukanya akses imigrasi merupakan suatu ancaman bagi nasionalisme negara Norwegia, dan kelompok sayap kiri tidak menghendaki adanya eksklusifisme di dalam kehidupan berbangsa Norwegia.

Banyaknya para imigran yang datang ke negara-negara di Norwegia akan membuat keadaan suatu negara menjadi lebih multikultural. Namun adapula sebagian masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai suatu ancaman karena para imigran mulai mempertahankan dan menunjukkan budaya, bahasa, dan agama mereka. Dalam hal ini asimilasi tidak bebas nilai atau bukan sebuah proses asimilasi yang berlangsung secara obyektif sebab dalam sebuah proses asimilasi budaya pihak mayoritas acapkali tidak tahan untuk menjadikan nilai mereka memiliki pengaruh dominan dalam sistem sosial suatu masyarakat (www.muliadinur.files.com). Dapat dikatakan bahwa pluralisme yang ada di Norwegia terpaksa harus dihadapkan pada pandangan-pandangan seperti konservatif dan fundamentalis. Sebagian masyarakat yang masih memiliki kecenderungan *xenophobia* akan mendukung gerakan sayap kanan yang dilakukan oleh Breivik, namun sebagian masyarakat lainnya juga merespon secara pluralis, bebas, terbuka dan memberikan toleransi di bidang religius (www.independent.ie).

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya respon anti-imigran di Norwegia didorong oleh faktor sosial dan faktor ekonomi. Banyaknya imigran yang datang ke Norwegia pada tahun-tahun terakhir mengindikasikan bahwa alasan utama mereka melakukan migrasi ialah disebabkan oleh alasan ekonomi, yaitu untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Faktor penarik juga menjadi salah satu pemicu datangnya para buruh imigran, pemerintah yang menjamin kebebasan berbudaya serta pemerintah juga menawarkan jaminan-jaminan sosial yang dianggap lebih menguntungkan daripada di negara asal. Pada awalnya buruh imigran sangat menguntungkan Norwegia namun lambat laun banyak buruh imigran yang menganggur di Norwegia tetap tinggal disana dan tidak kembali ke negara asalnya. Terlebih buruh imigran yang menganggur tersebut kurang memiliki potensi atau keterampilan sebagaimana yang diinginkan oleh Norwegia. Sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi

tidak seimbang akibat banyaknya penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang kurang terampil. Namun oleh Pemerintah Norwegia, buruh imigran diberi pelatihan kerja dan pelatihan bahasa sebelum memasuki pasar tenaga kerja agar memiliki daya saing.

Segala sesuatu yang dapat mengurangi kadar kesejahteraan individu dalam suatu negara dianggap sebagai suatu keadaan ketidakamanan ekonomi (*economic insecurity*). Menurut Lars Osberg, tingkat ketidakamanan ekonomi dapat berpotensi untuk mengubah perilaku individu sebagai akibat keadaan pasar tenaga kerja dalam suatu negara. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya respon anti-imigran di Norwegia. Kasus respon anti-imigran di Norwegia lebih karena adanya pandangan yang mengkhawatirkan bagaimana Norwegia akan tetap mempertahankan kesejahteraan warga negaranya. Pada dasarnya masyarakat Norwegia juga tidak sepenuhnya membatasi diri dalam menerima buruh imigran di negaranya, karena masih ada sebagian yang menganggap bahwa kehadiran buruh imigran dapat membawa keuntungan ekonomi negaranya. Namun Masyarakat Norwegia juga kurang menginginkan kebijakan masuknya imigrasi ke negaranya terlalu bebas, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya masyarakat Norwegia cukup toleran terhadap kelompok yang berbeda etnis serta terbuka dengan hadirnya para imigran selama kesejahteraan dan *economic security* penduduk pribumi Norwegia tetap terus terjaga.

Hatten dan Williamson berpendapat bahwa masyarakat di negara penerima imigran merasa bahwa buruh imigran akan mengambil alih pekerjaan mereka, namun perlawanan yang paling besar terhadap imigrasi ialah disebabkan karena biaya sosial (*societal costs*) dalam menerima kebudayaan yang berbeda, disamping karena alasan faktor ekonomi. Berdasarkan pandangan tersebut, masyarakat Norwegia juga dianggap belum sepenuhnya siap menerapkan pandangan pluralisme sebagaimana yang dipromosikan oleh pemerintahannya, karena dalam beberapa hal masih ditemukan contoh diskriminasi terhadap buruh imigran yang berbeda latar belakang agama, etnis, dan lain sebagainya. Perbedaan sikap anti-imigran di Norwegia memang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik populasi imigran di wilayah tersebut juga turut mempengaruhi sikap masyarakat Norwegia untuk mau berintegrasi atau justru melakukan upaya diskriminasi, sebagaimana yang diterima oleh buruh imigran muslim. Dampak dari banyaknya buruh imigran yang dimanfaatkan untuk pengembangan model kesejahteraan Norwegia akan sangat bergantung pada karakteristik pendatang baru atau buruh imigran itu sendiri, terkait bagaimana sumber daya atau kemampuan yang mereka bawa dan sejauh mana mereka mampu diintegrasikan dalam kehidupan kerja serta kehidupan bermasyarakat di Norwegia.

Pemerintah Norwegia juga berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan buruh imigran. Namun sebaliknya bagi masyarakat Norwegia khususnya partai sayap kanan, kedatangan para imigran dianggap sebagai sesuatu yang mengancam kedaulatan nasional. Dalam hal ini terdapat kontradiksi dimana pemerintah Norwegia berusaha bersifat liberal dan demokratis terhadap hadirnya para buruh imigran, namun di lain pihak sifat *xenophobic* masyarakatnya justru meningkat tajam. Terbukti setelah serangan bom Oslo, masyarakat konservatif semakin menunjukkan kekecewaannya terhadap partai Buruh dengan melakukan dukungan terhadap partai Konservatif dan partai Kemajuan. Akibat pemerintah membuka pasar tenaga kerja pada buruh imigran asing, pemerintah Norwegia kemudian dianggap kurang memperhitungkan bagaimana kesejahteraan masyarakatnya sendiri baik di bidang tenaga kerja maupun di bidang kehidupan lainnya. Di sisi lain, program yang dijalankan oleh pemerintah Norwegia tidak dapat berjalan dengan lancar dan mudah apabila tidak disertai dengan dukungan dari masyarakatnya sendiri. Apabila masyarakat Norwegia kurang mendukung upaya pemerintah, maka menjadi suatu hal yang dapat dimaklumi apabila terdapat tindakan-tindakan diskriminasi terhadap buruh imigran sebagai akibat rasa kekecewaan masyarakat terhadap sikap dan kebijakan pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Hansen, Randall. *Migration Policy in 'European Politics'* by Hay & Menon (New York: Oxford University Press, 2007)
- Pollak, Alexander. "Discrimination and Good Practice Activities in Education: Trends and Development in the 27 EU Member State": 395, *International Education*, Vol 19 no 5, (2008).

Situs Internet

- Bratsberg, Bernt. "Immigration Wage Impacts by Origin", http://www.norface-migration.org/publ_uploads/NDP_02_10.pdf (diakses 21 April 2013)
- "Brochmann Committee" (*the Norwegian Welfare and Migration Committee*). "Report of the Norwegian Welfare and Migration Committee", http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/nou_2_011_7_perspective_andsummary.pdf (diakses 21 April 2013)

- Cooper, Betsy. "Norway: Migrant Quality, Not Quantity", www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=307 (diakses 8 Maret 2012)
- DeLong-Bas, Natana. "The Attacks in Norway and the Price of Fear", <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=30115&lan=en&sp=0> (diakses 20 Maret 2012)
- Jacob, Louis. "Response of Norwegian People to the Killing Displayed Courage Beyond All Expectation" <http://www.independent.ie/opinion/analysis/norway-horror-shows-fundamentalism-not-pluralism-is-biggest-threat-to-world-26756751.html> (diakses 24 Desember 2013)
- Markaki, Yvonn. "What determines attitudes to immigration in European countries? An analysis at the regional level" <http://migration.oxfordjournals.org/content/early/2013/09/04/migration.mnto15.full> (diakses 22 November 2013)
- Mortensen, Gjendem Torgeir. 2013. "Integration in the Labour Market" <https://www.duo.uio.no/handle/10852/37216> (diakses 25 Oktober 2013)
- NBC news website. "Two Years after Breivik's Massacre Norway's Anti-Immigration Party Verges on Election Success" <http://worldnews.nbcnews.com/news/2013/09/09/20404155-two-years-after-breiviks-massacre-norways-anti-immigration-party-verges-on-election-success?lite> (diakses 12 Oktober 2013)
- News in English website. 2013. "Immigration viewed more favourably" <http://www.newsinenglish.no/2013/07/22/immigration-viewed-more-favourably/> (diakses 10 Februari 2014)
- New York Times website. 2013, "Norway's New Premier to Meet Anti-Immigrant Party" http://www.nytimes.com/2013/09/11/world/europe/norways-new-premier-prepares-for-talks-with-anti-immigrant-party.html?_r=0 (diakses 10 Februari 2014)
- Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 2008. "Immigration to Norway" <http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/nou-er/2008/nou-2008-14-2/11/3.html?id=538497> (diakses 10 Februari 2014)
- Norwegian Ministry of Labour, "International Migration 2011-2012", http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/IMO_report_2011_2012_final.pdf (diakses 21 April 2013)
- Norwegian Ministry of Labour, "Rapporter Action Plan Against Poverty 2008", http://www.regjeringen.no/en/archive/Stoltenbergs-2nd-Government/Ministry-of-Labour-and-Social-Inclusion/Rapporter_og_planer/planer/2008/action-plan-against-poverty-2008.html?id=531068 (diakses 15 Oktober 2013)
- "Norway's Statistics Website", www.ssb.no/innvandring_en/fig5-grunn-en.html (diakses 21 April 2012)

- “Norway Unemployment Rate”,
<http://www.tradingeconomics.com/norway/unemployment-rate>
(diakses 27 April 2012)
- “Norway Website”, http://www.norwegia.or.id/About_Norway/Politik-Luar-Negeri/organizations/prize/ (diakses 20 Maret 2012)
- Nur, Muliadi MH. “Investigasi Konsep Pluralisme Keagamaan dan Loyalitas Masyarakat kepada Tokoh Agama di Sulawesi Utara”
http://muliadinur.files.com/2008/10/makalah-tr-vi_muliadi-nur.pdf (diakses 24 Desember 2013)
- “Sociology Dictionary”,
http://sociology.about.com/od/X_Index/g/Xenophobia.htm
(diakses 24 Oktober 2013)
- Statistic Norway Website (SSB), “Living Conditions among Immigrants, 2005-2006”
<http://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/innvlev> (diakses 10 Februari 2014)
- UNDP. “Human Development Index: Norway at Top, Congo Last”,
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2011/11/02/2011-human-development-index-norway-at-top-dr-congo-last.html> (diakses 5 Juli 2012)
- US Department of State Website. “Background Note: Norway”
<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3421.htm> (diakses 5 Juli 2012)